

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis AkruaI dilakukan oleh KSAP melalui proses baku Penyusunan (*due process*). Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis AkruaI

dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh (IKAPI, 2011 : 07).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, suatu pemerintahan yang telah menerapkan SAP yang baik dan konsisten akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Dwitayanti, 2019 : 1). Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali pada tahun 2015, yang sebelumnya menerapkan akuntansi berbasis kas. Ini sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu. Tiap ikhtisar tersebut dibuat dalam satu format sendiri secara terpisah. Ikhtisar posisi keuangan tercermin dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Laporan ini mengikhtisarkan status atau posisi sumber daya pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas,

laporan perubahan modal/ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu kepada para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas (Samryn, 2017 : 30).

Menurut Ibu Nilawati “Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) tahun anggaran 2013 - 2019 atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada tahun 2013 LKPD kabupaten OKU mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), setahun kemudian tepatnya pada tahun 2014 LKPD kabupaten OKU masih tetap mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) karena belum memadainya pengelolaan persediaan, aset tetap dan aset lainnya. Fenomena yang terjadi, Mulai dari tahun 2015 pemerintah kabupaten OKU mulai melakukan pembenahan dengan cara Komitmen pimpinan, menyiapkan anggaran, rancangan sistem pengendalian internal, perbaikan sistem akuntansi keuangan serta sistem informasi manajemen barang daerah, peningkatan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi. Dalam menyusun laporan keuangan dan hasil dari pembenahan itu ialah membaiknya opini audit atas LKPD kabupaten OKU, ditahun 2015 LKPD kabupaten OKU mendapat opini

wajar tanpa pengecualian (WTP) sampai tahun 2019 pemerintah kabupaten OKU mencetak prestasi yaitu mendapat opini wajar tanpa pengecualian sebanyak lima kali berturut turut.” (BKAD OKU, 2021).

Hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan. Hubungan yang menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan di lingkup pemerintah, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten OKU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten OKU ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten OKU.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi kepentingan akademik, seperti mampu memberikan referensi dan tambahan literatur serta bahan perbandingan bagi akademisi serta peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan Lembaga Pemeriksa dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil, bagi Pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan dan kebijaksanaan peraturan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dan bagi pihak lain yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambahkan ilmu dan wawasan.